

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia (RI) No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa Guru adalah tenaga professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Guru sebagai tenaga professional diperlukan dalam dunia pendidikan. Menurut Novin dan Tucker (dalam Nurdin, 2008) profesionalisme mengajar adalah tingkat penguasaan dan pelaksanaan terhadap tiga hal: *Knowledge, Skill, dan Character*, jadi seorang yang profesional akan mempunyai tingkat tertentu pada ketiga bidang tersebut. Seorang guru sangat mutlak memerlukan profesionalisme yang baik. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan bahwa guru yang tidak profesional akan memberikan pelayanan yang juga tidak professional. Seorang yang professional dipercaya sangat ahli di bidang profesinya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik dan mendatangkan hasil yang diharapkan. Individu tersebut juga memberi pelayanan yang sebaik-baiknya dalam bidang profesinya.

Menurut Sinta (2009) guru profesional adalah guru yang berkualitas, berkompentensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa, yang nantinya akan

menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Kompetensi guru yang dituntut meliputi empat kategori. Pertama, kemampuan guru dalam merencanakan program belajar mengajar. Kedua, kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran. Ketiga, kemampuan guru dalam melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar. Dan keempat, kemampuan dalam menilai kemajuan proses belajar mengajar. Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu, sehingga untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki beberapa kompetensi.

Keprofesionalan guru merupakan harapan pemerintah, masyarakat, dan orangtua, sebab berhubungan dengan Keberhasilan belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan belajar siswa biasanya dilihat dari kualitas atau perubahan yang ditunjukkan siswa setelah mengikuti pembelajaran, sehingga dapat dinilai melalui sejauhmana kebutuhan belajar siswa dapat dipenuhi secara optimal oleh guru dengan melihat indikator-indikator yang mempengaruhi mutu lulusan, yaitu melalui Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pada kenyataannya, mutu pendidikan di Tanah Air sampai saat ini masih rendah. Cukup banyak bukti yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan ini. Rata-rata hasil ujian akhir nasional, ujian akhir sekolah atau apa-pun namanya untuk semua mata pelajaran berkisar pada rentangan 5 sampai 7 saja. Berbagai hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga internasional juga menempatkan prestasi siswa Indonesia pada posisi bawah. Terakhir, hasil survei TIMSS 2003 (*Trends in International Mathematics and Sciences Study*) di bawah payung *International*

*Association for Evaluation of Educational Achievement* (IEA) menempatkan Indonesia pada posisi ke-34 untuk bidang matematika dan pada posisi ke-36 untuk bidang sains dari 45 negara yang disurvei (Kompas, 22/12/2010).

Realitas yang memukul dunia pendidikan di Tanah Air ini, menjadi semakin lengkap, apabila dikaitkan juga dengan laporan dari UNDP (*United Nations Development Programme*) yang baru-baru ini dipublikasikan, berdasarkan laporan, Human Development Report 2004”, tersebut dinyatakan bahwa angka buta huruf dewasa (*adult illiteracy rate*) di Indonesia mencapai 12,1%. Ini berarti, dari setiap 100 orang Indonesia dewasa yang berusia 15 tahun ke atas, ada 12 orang yang tidak bisa membaca. Angka ini relatif jauh lebih tinggi, apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain, seperti Thailand (7,4%), Brunai Darussalam (6,1%) dan Jepang (0,0%). Kemudian pada tahun yang sama (2004), UNDP juga telah mengeluarkan laporannya tentang kondisi HDI (*Human Development Indeks*) di Indonesia. Dalam laporan tersebut, HDI Indonesia berada pada urutan ke 111 dari 175 negara. Posisi ini masih jauh dari Negara-negara tetangga, seperti Malaysia yang menempati urutan ke-59, Thailand yang menempati urutan ke 76 dan Philipina yang menempati urutan ke-83. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya menempati satu peringkat di atas Vietnam, sebuah negara yang baru saja keluar dari konflik politik yang besar dan baru memulai untuk berbenah diri namun sudah memperlihatkan hasilnya (Republika, 9 Mei 2005).

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana mencetak seorang guru yang memiliki kapabilitas keilmuan yang memadai dalam bidangnya, atau guru yang memiliki keluasan ilmu serta kematangan profesional, karena dengan mencetak guru yang profesional ini dapat

diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kualitas pendidikan atau mutu pendidikan menjadi lebih baik. Realisasi demi menjawab permasalahan tersebut sedikit banyak telah menggugah kalangan akademisi, sehingga pemerintah membuat perumusan untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme guru dari pelatihan sampai dengan instruksi agar guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1). Oleh karena itu, pemerintah juga mengadakan program sertifikasi keguruan dengan mensyaratkan pengajar memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Tidak hanya itu, tanggung jawab moral dan profesional guru juga harus ditunjukkan pasca keberhasilannya melewati proses sertifikasi, karena sertifikat pendidik yang telah dimilikinya justru merupakan simbol bahwa guru harus terus mengabdikan keahlian dan kompetensinya sebagai pendidik dan pengajar yang profesional, sebab kata profesional bukan sekedar sebutan yang disematkan untuk menunjukkan prestise guru atau gagah-gagahan semata-mata, namun kata profesional lebih diarahkan kepada sebuah upaya untuk membangun integritas dan kualifikasi guru agar mampu bertindak dalam tataran praktis yaitu menjadi agen pembelajaran yang kreatif dan produktif. Untuk menjadi pribadi seperti ini tentu diperlukan usaha dan kerja keras tak kenal lelah dan tak kenal usia (Adnyana, 2010).

Guru juga harus mampu mengadopsi sistem informasi dan teknologi, mampu dalam mengembangkan diri, mampu mentransformasi nilai-nilai dalam struktur tugas dalam menjalankan tugas profesinya, mampu membuat pengembangan tugas yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan membimbing siswa, kegiatan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Indikasi ketidakprofesionalan lainnya yakni hanya sebagian guru yang benar-benar menguasai teknologi informasi, dalam artian dapat mengajar dan memberikan modul-modul pembelajaran secara online. Seperti dikatakan Mulyasa (2007) bahwa seorang guru yang memenuhi kompetensi profesional diidentifikasi memenuhi hal-hal sebagai berikut, yakni: (a). Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis; (b). Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik; (c). Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya; (d). Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; (e). Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan; (f). Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; (g) mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; (h) mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Fenomena lain tentang adanya ketidakprofesionalan guru di SMAN 3 Sukoharjo yakni bahwa jam beban mengajar tiap guru adalah minimal 24 jam namun ada sebagian guru diberi tugas mengampu mata pelajaran lain yang tidak sesuai dengan bidang studinya padahal menurut Rugaiyah (2011) bahwa beban tugas kerja guru minimal 24 jam tatap muka perminggu dan maksimal 40 jam perminggu.

Kemudian juga terdapat fenomena bahwa sebagian guru belum mampu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sebagai salah satu komponen untuk memenuhi kompetensi profesional. Hasil wawancara pada dua guru SMAN 3 diperoleh informasi bahwa pembelajaran pada standar kompetensi mengelola data/informasi di tempat kerja masih jarang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Guru mengawali pelajaran dengan hanya menjelaskan materi, meminta

siswa berdiskusi lalu siswa presentasi di depan kelas, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang masih belum maksimal.

Tidak hanya itu saja, bahwa kurangnya keprofesionalan mengajar pada guru SLTA Negeri se-kabupaten Sukoharjo menyebabkan tingkat kelolosan uji sertifikasi belum 100%, yakni hanya 44,1%. Data ini diperoleh dari rekapitulasi sertifikasi guru yang bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Sukoharjo.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang belum profesional. Kompetensi guru yang ada di sekolah belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagaimana yang diinginkan oleh persyaratan guru profesional. Kurangnya profesionalisme guru saat ini, mungkin disebabkan ketidaktahuan tentang apa yang disebut sebagai guru yang profesional, apa saja kriterianya dan bagaimana cara menjadi seorang guru yang profesional dalam bidangnya.

Menurut Hermawan (2003) masih rendahnya tingkat profesionalisme guru dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal guru itu sendiri maupun faktor lainnya yang berasal dari luar. Faktor-faktor tersebut antara lain: a) kurangnya minat guru untuk menambah wawasan sebagai upaya meningkatkan tingkat profesionalisme sebab bertambah atau tidaknya pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas rutin tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diperolehnya. Kalaupun ada, hal itu tidak seimbang dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan; b) meledaknya jumlah lulusan sekolah guru dari tahun ke tahun.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru menurut Mulyasa (2007) antara lain disebabkan oleh: a). masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh sebagian guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga

tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri, baik membaca, menulis, apalagi membuka internet; b) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan negara-negara maju; c) adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesinya; d) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.

Arnold dkk (2008) dalam sebuah penelitian menyatakan guru yang professional digambarkan sebagai guru yang memiliki jangkauan pengetahuan yang luas. Selama siswa belajar kerja sama dan konteks sekolah adalah faktor utama yang dapat meningkatkan atau mengurangi pengetahuan profesional yang berlanjut pada guru. Ditambahkan oleh Yeigh (2008) pada penelitiannya bahwa para guru secara konstan diperlukan untuk selalu meningkatkan dan membaharui tingkatan keterampilan. Keinginan untuk selalu meningkatkan dan memperbaharui ketrampilan tersebut, umumnya terjadi melalui aktivitas pembelajaran yang profesional. Pembelajaran profesional itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor pendidikan, perkembangan pribadi dalam konteks kepercayaan, dan misi guru yang tinggi pada konsep pembelajaran.

Surya (2003) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Rasa kebersamaan tersebut dapat diartikan sebagai kondisi yang saling mendukung di antara sesama guru dan bisa diartikan pula sebagai bentuk dari dukungan sosial.

Maricar (dalam Syafrudin, 2007) menyatakan bahwa dukungan sosial yang ada di lingkungan kerja pada intinya akan mampu meningkatkan produktivitas hidup sebagai upaya pembentukan sikap kerja yang profesional. Dalam lingkungan sekolah, dukungan yang diharapkan yakni dukungan dari lingkungan kerja di sekolah pada seorang guru, yang mana dukungan tersebut akan sangat terlihat mempengaruhi profesionalisme mengajar pada guru. Apabila dukungan dari lingkungan sekolah bagus, maka ketika seorang guru mengalami masalah yang berhubungan dengan pengajaran, maka guru tersebut akan mampu memecahkan masalahnya dibantu oleh teman seprofesi dan dalam lingkungan kerjanya, selain itu guru akan mampu membedakan suasana kerja dengan di luar kerja serta menjaga reputasi. Profesionalisme kerja seperti ini tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya dukungan sosial dari orang-orang sekitarnya.

Ditambahkan oleh Ball (1988) bahwa dukungan sosial bagi sekolah yang berupa dukungan dari pemerintah, orang tua siswa, dan komunitas sekolah secara luas akan dapat meningkatkan profesionalisme guru. Menyambung hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu guru SMAN 3 Sukoharjo bahwa guru tersebut termotivasi untuk menjadi guru yang dapat mentransfer ilmunya secara baik ke murid dan terus meningkatkan profesionalisme ketika rekan sesama guru dapat berbagi informasi berkenaan dengan serifikasi dan metode mengajar yang bervariasi serta dari sekolah memberikan pelatihan tentang metode pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat diserap maksimal oleh para murid.



Rook dalam Smet (1994) mengatakan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial, dan ikatan-ikatan sosial tersebut menggambarkan tingkat kualitas umum dari hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan dengan orang lain dianggap sebagai aspek yang memberikan kepuasan secara emosional dalam kehidupan individu. Saat seseorang didukung oleh lingkungan maka segalanya akan terasa lebih mudah. Dukungan sosial menunjukkan pada hubungan interpersonal yang melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dari stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten.

Demikian pentingnya dukungan sosial bagi guru dalam meningkatkan profesionalisme mengajar sehingga dapat diasumsikan bahwa bila seorang guru mendapat dukungan sosial yang bagus di lingkungan sekolah maka guru tersebut akan dapat termotivasi dan mendapat fasilitas untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam mengajar.

Melihat fenomena di atas maka muncul permasalahan: apakah benar ada hubungan antara dukungan sosial sekolah dengan profesionalisme mengajar pada guru?’ Sehingga dari permasalahan tersebut penulis mengambil judul “Hubungan antara dukungan sosial dengan profesionalisme mengajar pada guru ”.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan profesionalisme mengajar pada guru.

2. Mengetahui peran antara dukungan sosial terhadap profesionalisme mengajar pada guru.
3. Mengetahui kondisi dukungan sosial pada guru.
4. Mengetahui kondisi profesionalisme mengajar pada guru.

### **C. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Guru, agar dapat lebih memahami pentingnya bersikap profesional dalam menjalankan perannya sebagai tenaga pendidik.
2. Kepala Sekolah, agar dapat membina dan memotivasi para guru untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam mengajar.
3. Peneliti selanjutnya, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang psikologi khususnya psikologi pendidikan.